ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMK NEGERI SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

Dimas Suliyanto¹

STIE Widya Gama Lumajang¹²³

Email: dimasacc89@gmail.com

INFO ARTIKEL

Volume 3

Nomor 1

Bulan September

Tahun 2020

Halaman 38-46

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Senduro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOS di SMK Senduro dan mengumpulkan data pendukung atas pernyataan yang disampaikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMK Negeri Senduro. Sekolah telah berjalan dengan sangat baik, karena penggunaan dana dipublikasikan langsung kepada stakeholders dan juga pencatatan, pelaporan dan pengarsipan dilakukan secara tertib dan tepat waktu.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengelolaan Dana BOS*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of transparency and accountability in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at Senduro Vocational High School. The method used in this study is a qualitative method where data collection uses interview and documentation techniques. In this study the authors conducted an interview with the Principal, the BOS Treasurer at Senduro Vocational High School and collected supporting data on the statements submitted. The results of this study indicate that the application of the principles of transparency and accountability in the management of BOS funds at Senduro Vocational High School has been going very well, because the use of funds is published directly to stakeholders and also recording, reporting and archiving is carried out in an orderly and timely manner.

Keywords: *Transparency, Accountability, and BOS Fund Management*

PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (BOS-SMK) merupakan Program Pemerintah yang kegiatannya berupa pemberian dana secara langsung kepada SMK baik Negeri maupun Swasta yang besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya bantuan yang telah ditetapkan Pemerintah pusat untuk disalurkan. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengungkapkan bahwa ada indikator yang menyatakan pengelolaan dana BOS bisa dianggap transparan dan akuntabel. Dengan mengacu pada ketentuan peraturan Pemerintah pengelolaan dana BOS bisa berjalan dengan baik. Transparansi dan Akuntabilitas merupakan suatu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat lemahnya pengelolaan dana BOS. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS berkaitan dengan keterbukaan atas pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS menyangkut ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS. Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas sangat penting terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri Senduro

Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Yang dimaksud data primer adalah data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrument yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat di generalisasikan hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat itu seperti kuesioner. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini berupa data internal, Data internal yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan, organisasi, instansi dimana penelitian dilakukan. Data internal biasaya berupa data-data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada didalam suatu perusahaan, organisasi, dan instansi tersebut, seperti, data keuangan, kepegawaian, kesiswaan dll. Adapun data internal di dalam penelitian ini berupa laporan tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMK Negeri Senduro. Laporan tersebut dapat berupa RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) atau LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tentang pengeluaran dana yang sudah dianggarkan di dalam RKAS.

Teknik Pengambilan subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling sering disebut juga sebagai judgement sampling, secara sederhana diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Jadi, pengambilan subjek penelitian atau responden dengan menggunakan purposive sampling dinyatakan sesuai dengan permasalahan yang peneliti bahas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkap masalah yang diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. dalam menentukan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling sering disebut juga sebagai judgement sampling, secara sederhana diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Jadi, pengambilan subjek penelitian atau responden dengan menggunakan purposive sampling dinyatakan sesuai dengan permasalahan yang peneliti bahas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkap masalah yang diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Wawancara

Wawancara memegang peranan penting di dalam penelitian ini, karena metode wawancara di dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan baik itu dari pihak kepala sekolah, Bendahara , maupun Tim pengelola Anggaran sekolah berdasarkan pada Indikator Transparansi dan Akuntabilitas yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia 3

Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019

Dokumentasi

Studi dokumen yang dilakukan di dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan data penelitian yang diperlukan dan penting untuk mengetahui Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dokumentasi dapat diperoleh dari Laporan

Pertanggung Jawaban Sekolah, RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah), serta Standar / Petunjuk Teknis Keuangan sekolah (Petunjuk Teknis Alokasi Penggunaan Dana BOS).

Teknik Analisis Data

Langkah 1 : Mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi selain itu mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara yang sesuai dengan indikator penilaian, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis- jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Langkah 2 : Mengidentifikasi data yang telah diperoleh dari lapangan. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan, bagaimana gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari partisipan. Pada tahap ini, Peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh.

Langkah 3 : Mengidentifikasi transparansi penggunaan dana yang berkaitan dengan publikasi Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS.

Langkah 4 : Mengidentifikasi Akuntabilitas penggunaan dana yang berkaitan dengan pembukuan yang mencakup Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku kas umum, Buku pembantu kas, Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, Opname kas dan berita acara pemeriksaan kas dan Bukti pengeluaran. Setelah itu dilanjutkan dengan identifikasi pelaporan yang mencakup realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi penggunaan dana BOS, pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, Laporan aset, laporan ke Dinas pendidikan dan laporan daring ke Laman BOS reguler.

Langkah 5 : Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Dalam hal ini, penelitian menyusun kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Indikator Transparansi

Transparansi sebagai salah satu bentuk tanggungjawab dalam mengelola program dan penggunaan bantuan BOS Reguler, Sekolah harus mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen yang wajib dipublikasikan oleh Sekolah meliputi:

Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana

Laporan ini harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana

Dokumen yang digunakan adalah laporan rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan komponen pembiayaan BOS Reguler. Laporan ini harus dipublikasikan tiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Indikator Akuntabilitas

Pertanggungjawaban menurut BAB 5 yang menjelaskan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dijadikan sebagai indikator penerapan prinsip akuntabilitas diantaranya:

Pembukuan

Dalam pengelolaan BOS Reguler, Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

RKAS ditandatangani oleh kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi apabila diperlukan dapat direvisi sesuai ketentuan yang berlaku. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk tiap sumber dana yang diterima Sekolah.

Buku Kas Umum

Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk sumber dana yang dimiliki oleh Sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal dan internal, baik tunai maupun nontunai. BKU harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi terjadi) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Tiap bulan harus dilakukan penutupan buku kas yang ditandatangani oleh bendahara dan kepala Sekolah.

Buku Pembantu Kas

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala Sekolah.

Buku Pembantu Bank

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank dalam bentuk cek, giro, atau tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala Sekolah.

Buku Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyeteroran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

Tiap kali menjelang penutupan BKU, kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di Sekolah dalam bentuk kas tunai maupun kas yang ada di bank atau rekening Sekolah. Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka kepala Sekolah dan bendahara menandatangani berita acara pemeriksaan kas.

Bukti pengeluaran

Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.

Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.

Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.

Tiap bukti pembayaran harus disetujui kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan. Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh Sekolah untuk BOS Reguler, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

Pelaporan

Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana.

Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola Sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh bendahara, kepala Sekolah, dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS Reguler yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS Reguler. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Reguler

Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler berdasarkan standar pengembangan Sekolah dan komponen pembiayaan BOS Reguler. Belanja atau penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja atau penggunaan dana yang bersumber dari BOS Reguler yang diterima Sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS Reguler tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS Reguler tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan Sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran Sekolah.

Laporan Aset

Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, Sekolah harus melaporkan hasil pembelian barang aset yang menggunakan dana BOS Reguler yang diterima pada tahun anggaran berkenaan. Mekanisme pelaporan belanja dari BOS Reguler dan penerimaan barang aset kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

Laporan ke Dinas Pendidikan

Tim BOS Reguler Sekolah harus menyampaikan dokumen laporan kepada tim BOS Reguler kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau tim BOS Reguler Provinsi untuk SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan. Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Selain laporan di atas, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan hasil belanja dari BOS Reguler dan penerimaan barang aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Laporan Daring ke Laman BOS Reguler

Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara daring ke laman BOS Reguler <http://bos.kemdikbud.go.id>. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan daring merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS tiap triwulan pada awal triwulan berikutnya

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Sehingga data yang digunakan juga kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat / uraian-uraian, bahkan bisa berupa cerita pendek. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, bahkan setelah selesai dilapangan. Adapun Obyek yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah SMK Negeri Senduro, di dalam penelitian ini berfokus pada Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Rencana kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2019 dibagi ke empat jenis kode rekening yaitu Belanja Pegawai BOS dengan Kode rekening 5210401 sebesar Rp. 75.000.000,-, Belanja Barang dan jasa BOS dengan kode rekening 5222701 sebesar Rp. 553.839.000,-, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dengan kode rekening 5232801 sebesar Rp. 148.631.000,- dan Belanja Modal Aset tetap lainnya BOS dengan kode rekening 5232802 sebesar Rp. 78.530.000,-. Realisasi penggunaan dana BOS tahun 2019 di SMK Negeri Senduro sebesar Rp. 825.920.000,-. Realisasi tersebut sesuai dengan perubahan atas anggaran kerja tahun 2019. Realisasi penggunaan dana tersebut digunakan untuk empat kegiatan utama yaitu Belanja pegawai sebesar Rp. 42.900.000,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 555.859.000,-, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar

Rp. 148.631.000,-, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 78.530.000,-.

Hasil Analisis Data

Penggunaan Dana BOS

SMK Negeri Senduro pada tahun 2019 mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 856.000.000,- yang dialokasikan untuk belanja Pegawai sebesar Rp. 75.000.000,-, Belanja Barang dan Jasa BOS Rp. 553.839.000,-, Belanja Modal Peralatan dan mesin BOS Rp. 148.631.000,- dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp. 78.530.000,-. Pada penerimaan Peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 SMK Negeri Senduro mengalami penurunan jumlah Siswa, sehingga berpengaruh dengan penerimaan Dana BOS yang semula Rp. 856.000.000,- per tahun turun menjadi Rp. 825.920.000,- per tahun. Perubahan Anggaran kerja (PAK) dilakukan pada bulan Oktober sesuai dengan Instruksi dari Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur. Rincian Perubahan tersebut menjadi Pegawai sebesar Rp. 42.900.000,-, Belanja Barang dan Jasa BOS Rp. 553.859.000,-, Belanja Modal Peralatan dan mesin BOS Rp. 148.631.000,- dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp. 78.530.000,-. Belanja pegawai hanya meliputi pembayaran honorarium mengajar Guru tidak tetap (GTT). Pembayaran honorarium GTT dialokasikan hanya pada triwulan ke-empat karena pada triwulan Ke 1,2 dan 3 didanai oleh BPOPP. Jumlah yang dibayarkan untuk Honorarium mengajar GTT menurut jam mengajar dengan perhitungan Rp. 50.000 Per OJPM (Orang Perjam mata pelajaran) dengan total seluruh alokasi Rp. 42.900.000. Belanja barang dan jasa di SMK Negeri Senduro sebesar Rp. 555.859.000,-. Jumlah tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan belanja menurut kode belanja diantaranya :Belanja alat tulis kantor, Belanja alat listrik dan elektronik, belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga habis pakai, Belanja bahan/bibit tanaman, Belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja barang praktek dan percontohan, Belanja penggantian suku cadang alat-alat operasional, Belanja telepon/faximili, Belanja listrik, Belanja langganan multimedia, Belanja akomodasi dan konsumsi, Belanja jasa dokumentasi dan publikasi, Belanja jasa narasumber/ tenaga ahli, Belanja cetak dan/atau penggandaan, Belanja sarana mobilitas darat dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BOS sejumlah Rp. 148.631.000,-. Belanja tersebut dialokasikan untuk pengadaan barang-barang yang masuk dalam kategori aset daerah diantaranya : Belanja modal pengadaan peralatan/perengkapan kantor, Belanja modal dan pengadaan Alat-alat komunikasi dan Belanja modal peralatan laboratorium. Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya hanya dialokasikan untuk belanja keperluan perpustakaan. Jumlah anggaran belanja untuk modal aset tetap lainnya adalah Rp. 78.530.000 yang sepenuhnya dialokasikan untuk pembelian buku perpustakaan yang pembeliannya juga perlu dicatat sebagai aset daerah karena termasuk dalam kategori Belanja Modal.

Penerapan Transparansi Di SMK Negeri Senduro

SMK Negeri Senduro memiliki Dua sumber pendanaan dalam Operasionalnya, seperti yang disebutkan oleh Bapak Zainal Abidin, S.Pd selaku pelaksana tugas "Ada dua sumber dana di SMK Negeri Senduro yaitu BOS dan BPOPP". Selain itu tanggapan yang sama diberikan oleh Bendahara BOS Bu Nikmatul Khusniyah, S.Pd yang mengatakan " Ada dua sumber dana, BOS dan BPOPP" beliau juga melanjutkan bahwa setiap penggunaan dari masing-masing sumber dana tersebut dipublikasikan ke Masyarakat melalui Web sekolah dan Papan pengumuman sekolah. Pendapat yang sama juga disebutkan pula oleh pak zainal yang mengatakan " Biasanya (penggunaan dana BOS dan BPOPP) dipublikasikan melalui Website dan mading sekolah".

Penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) di SMK Negeri Senduro dibuat berdasarkan komponen pembiayaan BOS reguler setiap jangka waktu tiga bulan karena dana yang disalurkan setiap tiga bulan sekali seperti yang dituturkan oleh Pak zainal Abidin, S.Pd yang mengatakan "Iya buat (Rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan komponen pembiayaan BOS), setiap 3 bulan karena pada tahun 2019 penyaluran dana dilakukan secara triwulan". Beliau melanjutkan bahwa penggunaannya juga dipublikasikan ke Masyarakat melalui Web Sekolah dan Papan Pengumuman, "Publikasi penggunaannya sama (dengan BPOPP), yaitu melalui web sekolah dan Papan pengumuman".

Penerapan Akuntabilitas Di SMK Negeri Senduro

Pengelolaan dana BOS di SMK Negeri Senduro dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebelum tahun anggaran dimulai yaitu sebelum bulan Januari 2020 serta dirinci dan dipisah sesuai dengan sumber dana dan kode belanjanya, seperti yang diungkapkan oleh Kepala SMK Negeri Senduro Bapak Zainal Abidin, S.Pd "Setiap tahun anggaran sekolah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebelum Januari, jadi saat tahun anggaran dimulai sudah bisa mulai direalisasikan". (RKAS) sudah kami pisah dan rincis sesuai dengan sumber dana dan kode belanjanya" lanjutnya. Dalam mengelola buku kas umum Bendahara BOS Ibu Nikmatul Khusniyah, S.Pd menyatakan sudah membuat buku kas umum yang di dalamnya sudah termasuk 3 Buku pembantu yaitu Buku pembantu kas, Buku pembantu bank dan Buku Pembantu Pajak. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala SMK Negeri Senduro "Buku Kas Umum selalu disusun dalam pengelolaan dana", beliau melanjutkan "Iya (Buku Kas umum termasuk mencatat mutasi kas, bank dan pajak), karena di buku kas umum sudah termasuk 3 buku

pembantu tersebut”. Bapak Zainal pada jawaban selanjutnya juga memaparkan bahwa pada akhir bulan pencatatan pengelolaan dana BOS dilakukan Opname kas dan penutupan kas yang masing-masing dari hal tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara sesuai dengan format dalam Petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Beliau menyampaikan “Kas ditutup setiap akhir bulan”, beliau melanjutkan “Ada (Opname kas) sebelum kas ditutup opname kas dilakukan terlebih dahulu dan hasil dari pemeriksaan kas dibuat berita acara sesuai dengan format BOS K7b dan BOS K7c”. Pengelolaan dana BOS di SMK Negeri Senduro bukti pengeluaran didukung oleh bukti- bukti pendukung yang sah. Kwitansi sebagai bukti pengeluaran yang sah dengan dibubuhi materai yang cukup di masing-masing lembarnya dan uraian pembayaran yang ada di kwitansi sudah terperinci, seperti yang disampaikan oleh Bapak Zainal “Kwitansi dan bukti-bukti pendukung juga dilampirkan (sebagai bukti pengeluarannya)”, Beliau juga melanjutkan mengenai rincian kwitansi “Iya (Kwitansi dibubuhi materai yang cukup), Materai 3000 untuk pengeluaran Dua puluh lima ribu rupiah sampai dengan Satu juta rupiah dan di atas Satu juta rupiah menggunakan Materai 6000” Beliau melanjutkan dipernyataan berikutnya “Iya (Uraian dalam kwitansi sudah jelas dan terperinci)”. Beliau juga menambahkan bahwa uraian tentang jenis barang dan jasa yang dibayar dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi dan bukti pembayaran sudah disetujui oleh Kepala Sekolah dan Disetujui oleh Bendahara, Beliau menyampaikan “Iya (uraian tentang jenis belanja barang/jasa yang dibayar dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi), Faktur telah dipisah sesuai dengan barang yang telah dibelanjakan”, Beliau juga menambahkan “Iya (bukti pembayaran sudah disetujui oleh Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara), terbukti dengan adanya tanda tangan di setiap lembar kwitansi”. Pengarsipan di SMK Negeri Senduro dilakukan dengan baik dengan menyimpan segala jenis dan bukti pengeluaran oleh Bendahara sebagai bukti dan bahan bukti dan bahan laporan seperti yang disampaikan oleh Bapak Zainal Abidin S.Pd selaku Kepala SMK Negeri Senduro “Iya. (Segala jenis dan bukti pengeluaran telah disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan), disimpan di ruang tata usaha.

Setiap Triwulan sekolah membuat Rekapitulasi penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite sekolah dan Bendahara dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan BOS Reguler yang telah diterima digunakan sesuai NPH BOS Reguler. Kepala Sekolah menyampaikan “Iya (Setiap Triwulan sekolah membuat Rekapitulasi penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite sekolah dan Bendahara dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan BOS Reguler yang telah diterima digunakan sesuai NPH BOS Reguler)”. SMK Negeri Senduro juga membuat rekapitulasi penggunaan dana BOS reguler berdasarkan standar pengembangan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah sekolah dan komponen pembiayaan BOS Reguler, yang sesuai dengan Penuturan Kepala Sekolah “iya (membuat rekapitulasi penggunaan dana BOS reguler berdasarkan standar pengembangan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah sekolah dan komponen pembiayaan BOS Reguler), yang selanjutnya digunakan untuk laporan ringkas” Dalam menerapkan transparansi di SMK Negeri Senduro, Pihak sekolah mencatat kegiatan pelayanan dan Pengaduan Masyarakat dan dokumennya disimpan di sekolah dan bisa ditunjukkan saat ada pemeriksaan, seperti yang disampaikan Bendahara BOS Ibu Nikmatul Khusniyah, S.Pd “Iya (Pihak sekolah mencatat kegiatan pelayanan dan Pengaduan Masyarakat dan dokumennya disimpan di sekolah dan bisa ditunjukkan saat ada pemeriksaan). Laporan penggunaan dana BOS dilakukan secara rutin. Sekolah melaporkan kegiatan pembelian aset yang menggunakan dana BOS reguler dalam pembeliannya, seperti yang disampaikan Bu Nikma selaku Bendahara BOS “Iya (Sekolah melaporkan kegiatan pembelian aset yang menggunakan dana BOS reguler dalam pembeliannya), dituangkan dalam BOS 09 dan Aplikasi Sistem pengelolaan Barang Daerah (SIMBADA)”. Pelaporan penggunaan Dana BOS ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Setiap Triwulan secara daring dan setiap semester secara luring, sesuai dengan yang disampaikan Kepala Sekolah “Iya (Sekolah melaporkan penggunaan Dana BOS ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur setiap triwulan secara Online dan setiap semester secara offline)”. Selain itu SMK Negeri Senduro melaporkan penggunaan dana BOS ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara Online melalui situs <http://bos.kemdikbud.go.id> sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan BOS seperti yang disampaikan Bapak Zainal “SMK Negeri Senduro melaporkan penggunaan dana BOS ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara Online melalui situs <http://bos.kemdikbud.go.id> sesuai dengan petunjuk teknis”.

Pembahasan

Penerapan Transparansi Penggunaan dana BOS di SMK Negeri Senduro

Noorlisa (2018) menyatakan bahwa Transparansi merupakan sebuah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai keterbukaan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai keterbukaan di dalam pengelolaan Dana BOS merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan sekolah dalam menjalankan amanah dari Pemerintah di dalam mengelola dana bantuan. Transparansi di dalam pengelolaan dana BOS sangatlah dibutuhkan dalam rangka peningkatan kepercayaan bersama antara tim pengelola dana dengan pemangku kepentingan yang ada di dalam lembaga tersebut terutama kepada Pemerintah.

Untuk mengetahui tentang penerapan prinsip transparansi di dalam pengelolaan pengelolaan dana BOS di SMK Negeri Senduro, Peneliti melakukan metode wawancara dan studi dokumen untuk mendapatkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara BOS diketahui kesamaan penjelasan Responden, bahwa ada dua sumber dana yang ada di SMK Negeri Senduro yaitu Dana BOS SM dan Dana BPOPP. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sedangkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada sekolah merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional personalia dan non personalia bagi SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penggunaan Dana BOS dan BPOPP pada tahun 2019 dipublikasikan kepada umum dengan cara melalui Web sekolah, Papan pengumuman dan mading sekolah. Publikasi ini bertujuan untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan Dana, Sehingga penggunaannya menjadi transparan dan tidak ada prasangka buruk atas pengelolaan Dana BOS dan BPOPP. Petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada tahun 2019 menyebutkan salah satu indikator transparansi yaitu membuat rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan komponen pembiayaan BOS reguler. Pada SMK Negeri Senduro sudah membuat rekapitulasi penggunaan dana BOS sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Reguler Tahun 2019. Sesuai dengan pernyataan Pelaksana tugas Kepala SMK Negeri Senduro yang menyatakan bahwa Rekapitulasi penggunaan Dana BOS dibuat setiap 3 bulan sesuai dengan dana yang disalurkan oleh Pemerintah yang setiap 3 bulan penyalurannya. Selain itu rekapitulasi penggunaan dan BOS tersebut dipublikasikan kepada khalayk umum dengan dipajang di Papan pengumuman serta Website sekolah. Berdasarkan jawaban dan pernyataan serta data pendukung berupa dokumentasi yang telah dikumpulkan, serta adanya analisis atas data yang terkumpul, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa SMK Negeri Senduro telah memenuhi indikator Transparansi penggunaan dana BOS Reguler sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019.

Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Penerapan prinsip akuntabilitas sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan di suatu lembaga pendidikan, terutama dalam pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan penggunaan dana BOS menjadi lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini berarti sebuah pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pelaporan dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019.

Dana BOS adalah dana yang bersumber dari Pemerintah untuk meringankan beban peserta didik dan membantu mendanai kegiatan operasional sekolah di dalam menjalankan dunia pendidikan. Oleh karena itu Dana BOS harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan sekolah di dalam mengembangkan dunia pendidikan.

Dalam teori sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan dari Akuntabilitas adalah menentukan tujuan yang tepat. Yang dimaksud tujuan yang tepat dalam hal ini adalah memanfaatkan pengelolaan dana secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019.

SMK Negeri Senduro sudah menerapkan akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan Dana BOS. Perencanaan penggunaan dana BOS dimulai saat mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS menurut penuturan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS disusun sebelum bulan Januari sehingga saat tahun anggaran dimulai pada bulan Januari sudah mulai bisa direalisasikan. Realisasi penggunaan BOS dimulai setelah anggaran disahkan pada tanggal 2 Januari 2020 oleh Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Jember. RKAS yang disusun oleh SMK Negeri Senduro telah dirinci sesuai dengan setiap sumber dana yang telah diterima oleh sekolah serta kode jenis belanjanya.

Pembukuan penggunaan dana dalam buku kas umum yang disusun oleh SMK Negeri Senduro mencatat segala pengeluaran dan penerimaan dana BOS termasuk juga pengeluaran dan penerimaan kas, mutasi dana di bank dan pungutan pajak. Setiap akhir bulan dilakukan penutupan kas oleh bendahara yang sebelumnya diperiksa oleh Kepala Sekolah dengan diberita acaranya dengan berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas.

Transaksi pengeluaran dana BOS didukung dengan kwitansi yang bermaterai cukup dengan materai 3000 jika pengeluaran mulai dari Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1000.000,-, sedangkan pengeluaran diatas Rp. 1.000.000,- dibubuhi materai 6000. Uraian pembayaran yang ada di kwitansi sudah jelas dan terperinci tujuan pembayarannya dengan dilampiri faktur sesuai dengan rincian barang yang dibelanjakan. Setelah itu

kwitansi ditandatangani oleh Kepala sekolah dan dilunas dibayar oleh Bendahara dan Laporan serta bukti-bukti pengeluaran diarsip oleh Bendahara di ruang tata usaha.

Setiap triwulan SMK Negeri Senduro membuat rekapitulasi penggunaan setiap sumber dana yang ditandatangani Kepala Sekolah, Komite dan Bendahara dengan dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOS Reguler telah diterima dan digunakan sesuai dengan NPH BOS. Selain itu, sekolah juga membuat rekapitulasi penggunaan dana BOS Reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS Reguler dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

SMK Negeri Senduro dalam pelaksanaan administrasi keuangan juga perlu mencatat kegiatan pelayanan dan pengaduan masyarakat sehingga saat ada pemeriksaan buku catatan tersebut juga bisa ditunjukkan .

SMK Negeri Senduro melakukan pelaporan keuangan secara rutin ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaporan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur setiap semester, sekolah melaporkan penggunaan dana BOS termasuk juga pembelian aset yang harus dicatat sebagai barang inventaris sekolah dan aset daerah Provinsi Jawa Timur. Selain itu laporan secara online juga dilakukan setiap triwulan menggunakan Google Form yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Juga lama <http://bos.kemdikbud.go.id>.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada SMK Negeri Senduro sudah berjalan dengan baik dan terlaksana sepenuhnya. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOS) di SMK Negeri Senduro dan penerapannya yang telah berjalan dengan baik. Selain itu seluruh indikator transparansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 telah terpenuhi.

Pembukuan keuangan di SMK Negeri Senduro Sudah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. SMK Negeri Senduro mencatat transaksi pendapatan dan belanja dengan basis kas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana

KESIMPULAN

Penerapan Transparansi Penggunaan Dana BOS

Berdasarkan analisis data yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada SMK Negeri Senduro secara garis besar telah melaksanakan prinsip Transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Dengan mempublikasikan penggunaan dana dari setiap sumber dana yang ada di sekolah kepada dewan guru, Komite sekolah, Siswa dan Wali murid dengan memasang Rekapitulasi penggunaan dana di Papan Pengumuman dan Website sekolah. Hal ini termasuk dalam penerapan prinsip transparansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 . Karena informasi atas bantuan dana dari Pemerintah dapat diketahui jumlahnya dan digunakan untuk apa saja dapat diketahui oleh khalayak umum. Setidaknya warga sekolah mengetahui akan hal tersebut dan di awal tahun ajaran akan disampaikan dalam rapat Sosialisasi wali peserta didik baru. Dengan demikian dapat dikatakan penerapan prinsip transparansi sudah berjalan dengan baik di SMK Negeri Senduro.

Penerapan Akuntabilitas Penggunaan Dana BOS

Penerapan prinsip akuntabilitas pada SMK Negeri Senduro sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republic Indonesia 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019. Hal ini dapat terbukti dengan adanya adanya pembukuan atas setiap transaksi , administrasi yang tertib, pelaporan tepat waktu dan pengarsipan setiap laporannya. Dengan demikian kemudahan mengakses informasi tentang pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler dapat dilakukan dengan cepat dan dapat diakses dengan mudah

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government. Malang : Bayumedia Publishing 2007
- Azizah, Nur. 2017. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi kasus SDN Bandaran Periode 2015. STIE Widyadaga : Lumajang
- Faisol. 2017. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Pejarakan Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2016. STIE Widyagama : Lumajang
- Hardi dan Noviansyah. 2012. Pengaruh Partisipasi Manajemen Terhadap Kepatuhan, Kebenaran Laporan, Transparansi, dan Akuntabilitas Melalui Akuntansi Instansi, Vol. 2, No. 1:34- 41.

- Hariswati, Nurul. 2015. Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS. Universitas Brawijaya: Malang.
- Julantika, Tutus. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Pringgowirawan 02 Kec. Sumberbaru Kab. Jember Tahun 2014. Universitas Jember.
- Laila, Umi, Nur. 2018. Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang.
- Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi. 2002.
- Makhmudah, Syahriyatul. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. STIE Widyagama : Lumajang
- Minarti, Sri. Manajemen Berbasis Sekolah : Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. 2011.
- Maknun, Nafisatil. 2019. Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Studi Kasus Di SD Negeri Tambakan Bakil. Universitas Negeri Sunan Ampel : Surabaya
- Novie dan Nyoman. 2017. Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja. Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Solikhatun, Ismi. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Pada SMKN 1 Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta
- Wahyudi, Nanang. 2018. Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri 2 Lumajang. STIE Widyagama : Lumajang
- Wahyuningsih, Dwi, Tika. 2016. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 2 Gembong Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta